

**STUDI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH.**

***THE STUDY OF LOCAL REVENUE AND TRANSFER FUNDS ON THE LEVEL OF  
LOCAL FINANCIAL INDEPENDENCE.***

T. Syaharani, A. Sulistyowati\*

Universitas Siber Muhammadiyah

Korespondensi: [anditasulistyowati@sibermu.ac.id](mailto:anditasulistyowati@sibermu.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and transfer funds, including General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and Grant Funds, on the Level of Local Financial Independence (KKD). Achieving fiscal independence is a key pillar of regional autonomy, but most regions still depend on transfers from the central government. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 23 district/city governments in West Java Province during the period 2022–2024, with a total of 69 observation units. The results show that (1) Local Own-Source Revenue (PAD) has a positive and significant effect on KKD; (2) General Allocation Funds (DAU) have a negative and significant effect on KKD; (3) Special Allocation Funds (DAK) have a negative and significant effect on KKD; and (4) Grant Funds have a positive and significant effect on KKD. Meanwhile, (5) Revenue Sharing Funds (DBH) were not found to have a significant effect on KKD. All independent variables simultaneously explained 91.0% of the variation in KKD. These findings imply that strengthening fiscal autonomy in West Java is more determined by the internal capacity of the region to mobilize PAD and the productive use of Grant Funds, while dependence on DAU and DAK is counterproductive.*

**Key words:** *Fiscal Decentralisation, Regional Financial Independence, Regional Own-Source Revenue, Transfer Funds, West Java.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Hibah, terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Mencapai kemandirian fiskal merupakan pilar utama otonomi daerah, namun sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, yang menghasilkan 23 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2022–2024, dengan total 69 sampel observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KKD; (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KKD; dan (4) Dana Hibah berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD. Sementara itu, (5) Dana Bagi Hasil (DBH) ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap KKD. Seluruh variabel independen secara simultan menjelaskan 91,0% variasi KKD. Temuan ini menyiratkan bahwa penguatan otonomi fiskal di Jawa Barat lebih ditentukan oleh kapasitas internal daerah untuk memobilisasi PAD dan penggunaan Dana Hibah yang produktif, sementara ketergantungan pada DAU dan DAK bersifat kontraproduktif.

**Kata kunci:** Dana Transfer, Desentralisasi Fiskal, Jawa Barat, Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Secara filosofis, desentralisasi bukan hanya sekadar penyerahan wewenang administratif, tetapi juga penyerahan tanggung jawab fiskal yang substansial. Inti dari keberhasilan otonomi adalah terciptanya Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), yaitu kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri agenda pembangunan, operasional, dan pelayanan publik tanpa didominasi oleh intervensi atau bantuan eksternal. Kemandirian ini berfungsi sebagai barometer utama kesehatan fiskal dan maturitas politik pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar kabupaten dan kota tetap bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ini bertentangan dengan harapan ideal. Karena ada perbedaan antara keyakinan kemandirian dan kenyataannya tergantung, belanja pemerintah daerah lebih sensitif terhadap dana perimbangan daripada PAD (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Riyadi (2022) menemukan dalam konteks Provinsi Jawa Barat bahwa, meskipun tren rata-rata kemandirian meningkat, banyak kabupaten/kota masih berada dalam kategori kemandirian rendah karena ketergantungan mereka yang besar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini diperkuat oleh temuan Andriani dan Wahid (2018) pada studi kasus di Kota Tasikmalaya, yang menunjukkan bahwa dana perimbangan masih menjadi instrumen dominan untuk menutupi defisit belanja daerah, sehingga menghambat terwujudnya otonomi fiskal yang substansial.

Kajian empiris mengenai determinan kemandirian keuangan daerah sejauh ini masih menyajikan temuan yang beragam dan belum konklusif. Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), misalnya, Bella et al. (2022) menemukan bukti bahwa DAU mampu memberikan stimulus positif dan signifikan

pada aspek kemandirian keuangan. Temuan bertolak belakang dengan hasil penelitian Musfirati dan Sugiyanto (2021) yang menyimpulkan bahwa DAU justru memiliki pengaruh negatif signifikan yang mengindikasikan adanya efek ketergantungan. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Andriana (2020), Riyadi (2022), serta Puspitasari dan Salisa (2017) secara konsisten tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari instrumen DAU terhadap kemandirian. Perbedaan temuan juga teridentifikasi pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK); Riyadi (2022) serta Musfirati dan Sugiyanto (2021) membuktikan bahwa DAK mampu menstimulasi kemandirian fiskal secara positif, kontras dengan temuan Saraswati dan Nurharjanti (2021) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial tidak memiliki dampak signifikan. Selanjutnya, pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Musfirati dan Sugiyanto (2021) serta Andriana (2020) menyimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kemandirian, sebuah temuan yang menyimpang dari ekspektasi teoritis desentralisasi fiskal. Variasi bukti empiris dari berbagai locus dan periode penelitian inilah yang mendasari urgensi pengujian kembali determinan kemandirian keuangan daerah, khususnya dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat di pilih menjadi lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik kemampuan keuangan daerah yang bervariasi antarwilayah. Berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024), terlihat adanya perbedaan tingkat kemandirian yang mencolok. Daerah dengan basis industri dan jasa seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung mencatatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 38,90% dan 39,47% dari total pendapatannya. Kondisi ini berbeda dengan daerah lainnya, seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran, yang kontribusi PAD-nya masih berada pada kisaran 9,10% dan 16,98%. Pada daerah dengan kontribusi PAD yang rendah tersebut, peran dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan dalam menopang

anggaran daerah. Variasi kondisi keuangan inilah yang menjadikan Provinsi Jawa Barat relevan untuk diteliti lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian pada keuangan daerah.

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan hak dan tanggung jawab pemerintah pusat serta daerah dalam mengelola keuangan guna menciptakan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang administratif, perencanaan, atau pengambilan keputusan ke tingkat sub-nasional. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Kemandirian keuangan daerah merupakan konsep sentral untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan melalui pendapatan internal tanpa ketergantungan berlebih pada bantuan pusat. Halim (2007) menyatakan bahwa kemandirian fiskal diukur melalui rasio PAD terhadap total penerimaan. Namun, realitas empiris menunjukkan ketersediaan pembiayaan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, yang menurut Hapsari et al. (2025) mencerminkan pola hubungan instruktif di mana daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Dalam perspektif teori keagenan, desentralisasi menuntut pemerintah daerah (agen) mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pemerintah pusat dan masyarakat (prinsipal).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, instrumen utama yang menjadi fokus analisis selain PAD adalah aliran dana dari pihak eksternal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penelitian ini menyoroti komponen dana transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain ketiga dana transfer tersebut, Dana Hibah turut dianalisis sebagai variabel independen mengingat

karakteristiknya sebagai penerimaan yang bersumber dari pemerintah lainnya, badan usaha, atau masyarakat yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi kapasitas fiskal daerah

Meskipun demikian, esensi dari transfer fiskal maupun hibah ini sejatinya bersifat gap-filling atau penutup celah kekurangan pendanaan, bukan sebagai sumber pendapatan permanen yang menggantikan peran daerah dalam menggali potensi lokalnya. Halim (2012) menegaskan bahwa idealnya dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah berfungsi sebagai stimulus bagi pemerintah daerah untuk membiayai kewenangannya secara efektif, sembari terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama kemandirian. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan variabel-variabel eksternal tersebut (DAU, DAK, DBH, dan Hibah) untuk diuji pengaruhnya, guna melihat apakah fungsinya di Jawa Barat sudah berjalan sebagai stimulus kemandirian atau justru menciptakan jebakan ketergantungan.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan fenomena yang telah dipaparkan, maka penelitian ini merumuskan lima hipotesis utama sebagai dasar pengujian empiris. Pertama, peningkatan kemampuan daerah dalam memobilisasi potensi internal melalui pajak dan retribusi diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan mandiri, sehingga J1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kedua, besarnya alokasi transfer umum yang tidak dibatasi penggunaannya seringkali memicu efek disinsentif dan mental ketergantungan, maka J2: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ketiga, alokasi dana transfer yang bersifat khusus dan terikat pada prioritas nasional cenderung membatasi diskresi fiskal daerah, sehingga J3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Keempat, penerimaan yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam dan pajak pusat yang bersifat fluktuatif diduga tidak memberikan dampak statistik yang nyata

terhadap stabilitas kemandirian, sehingga J4: Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Terakhir, dukungan pendanaan melalui instrumen hibah yang bersifat eksternal dan tidak rutin berpotensi menurunkan motivasi daerah dalam optimalisasi sumber pendapatan lokal, sehingga J5: Dana Hibah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022-2024 yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan prosedur eliminasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki data lengkap terkait komponen variabel penelitian yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, dan Dana Hibah.
2. Tersedia data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara konsisten untuk tahun pengamatan 2022, 2023, dan 2024.
3. Tidak terdapat kekosongan data pada seluruh variabel yang digunakan dalam model analisis.

Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah pemerintah daerah yang tidak memiliki data lengkap dieliminasi dari daftar. Setelah proses seleksi, diperoleh 23 pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian dengan total 69 unit observasi (23 daerah x 3 tahun).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Hibah. Penjelasan mengenai definisi dan pengukuran masing-masing variabel disajikan secara ringkas pada tabel 1

**Tabel 1. Variabel dan Pengukuran**

Variabel	Simbol	Pengukuran
<b>Variabel Dependen</b>		
Kemandirian Keuangan Daerah	TKKD	Persentase rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah
<b>Variabel Independen</b>		
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah
Dana Alokasi Umum	DAU	Persentase Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan daerah
Dana Alokasi Khusus	DAK	Persentase Dana Alokasi Khusus terhadap total pendapatan daerah
Dana Bagi Hasil	DBH	Persentase Dana Bagi Hasil terhadap total pendapatan daerah
Dana Hibah	DH	Persentase Pendapatan Dana Hibah Terhadap pendapatan daerah

Sumber: Data yang diolah (2025)

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Tahapan

pengujian dimulai dengan Analisis Statistik Deskriptif untuk melihat gambaran umum

data. Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji Signifikansi Parsial (Uji t) dan analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini diterapkan dengan tujuan untuk menghimpun, mengorganisasikan, serta

menelaah data agar dapat disajikan secara sistematis dan akurat. Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai profil data yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta standar deviasi pada masing-masing variabel penelitian (Hermawan et al., 2021). Analisis ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan rentang pengamatan dari tahun 2022 hingga 2024. Ringkasan temuan statistik deskriptif dari seluruh variabel yang diuji dipaparkan secara rinci melalui Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kemandirian Keuangan	69	1.08	162.40	50.5283	44.11970
Pendapatan Asli Daerah	69	0.54	85.94	16.9797	18.96685
Dana Alokasi Umum	69	8.47	40.85	22.4466	8.39664
Dana Alokasi Khusus	69	1.12	18.88	7.0635	4.50083
Dana Bagi Hasil	69	0.34	8.49	2.3198	1.69605
Dana Hibah	69	0.003	5.01	0.6025	0.81354
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data yang diolah (2025)

Hasil analisis statistik deskriptif untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2. Untuk melakukan analisis ini, lima variabel independen dan satu variabel dependen digunakan, dan total sampelnya adalah 69 observasi. Untuk variabel tingkat kemandirian keuangan daerah, diperoleh nilai rata-rata sebesar 50,4758, dengan nilai minimum 1,08 dan nilai maksimum 162,40, sehingga rentang data mencapai 161,32. Nilai standar deviasi sebesar 44,6236 menunjukkan bahwa data tersebar luas, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan fiskal antar daerah.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai rata-rata yang diperoleh adalah 16,9785, dengan nilai minimum 0,54 dan maksimum 85,94. Rentang sebesar 85,40 dan standar deviasi 19,7144 mengindikasikan bahwa PAD antar daerah memiliki variasi yang cukup besar, mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal lokal.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai rata-rata tertinggi dibanding variabel lain, yaitu 23,1060, dengan nilai minimum 8,47 dan maksimum 40,85. Rentangnya sebesar 32,38, disertai standar deviasi 8,7092, menggambarkan variasi moderat dalam distribusi DAU yang diterima

antar daerah sesuai perhitungan kebutuhan fiskal masing-masing.

Untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), diperoleh rata-rata sebesar 7,2710, dengan nilai minimum 1,12 dan maksimum 18,88. Rentang data sebesar 17,76 dan standar deviasi 4,4265 menunjukkan variasi yang relatif sedang, sejalan dengan sifat DAK yang dialokasikan berdasarkan program prioritas tertentu.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki rata-rata 2,3880, dengan nilai minimum 0,34 dan maksimum 8,37. Rentangnya sebesar 8,03, dengan standar deviasi 1,7625, menunjukkan bahwa DBH memiliki kontribusi relatif kecil dan tidak merata antar daerah.

Variabel Dana Hibah (DH) menunjukkan nilai rata-rata terendah yaitu 0,6200, dengan nilai minimum 0,003 dan maksimum 5,01, serta standar deviasi 0,7273. Hal ini menunjukkan bahwa dana hibah tidak menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar daerah dalam periode penelitian.

Secara umum, pola statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi pada sebagian besar variabel, khususnya PAD dan tingkat kemandirian keuangan. Variasi ini memungkinkan hubungan antar variabel dianalisis lebih lanjut melalui uji korelasi dan regresi untuk melihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## 2. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.958	0.917	0.910	13.21551

Sumber: Data yang Diolah (2025)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) melalui Model *Summary*. Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,910. Hal ini menggambarkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4), dan Dana hibah (X5) mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 91,0%, sementara sisanya 9,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Selain itu, nilai R Square sebesar 0,917 menunjukkan bahwa hubungan simultan antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat, mengingat nilai tersebut mendekati angka 1. Menurut Gujarati (2003), nilai  $R^2$  yang tinggi menandakan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang baik terhadap variasi data yang diamati.

Nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 13,21551 menunjukkan tingkat penyimpangan antara nilai aktual dan nilai prediksi model. Semakin kecil nilai *standard error*, semakin tinggi akurasi prediksi model regresi. Dengan nilai ini, model dapat

dikategorikan memiliki tingkat ketepatan prediksi yang baik dalam konteks penelitian keuangan daerah, yang secara empiris sering menunjukkan variasi data yang cukup besar.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik, dengan tingkat kecocokan model (*goodness of fit*) yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang disusun layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, termasuk uji simultan dan uji parsial terhadap masing-masing variabel independen.

### 3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

**Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Simultan**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	121362.343	5	24272.469	138.978	0,000
Residual	11002.930	63	174.650		
Total	132365.274	68			

Sumber: Data yang Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 yang memuat hasil uji ANOVA, terlihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) pada model regresi sebesar 0,000. Nilai ini berada jauh di bawah tingkat probabilitas 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara simultan. Artinya, seluruh variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4), dan Dana hibah (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, nilai F hitung sebesar 138,978 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas (*explanatory power*) yang sangat kuat terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018), semakin besar nilai F, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, nilai F yang tinggi menandakan bahwa variasi dalam tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan secara substansial oleh kombinasi variabel-variabel independen dalam model.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji statistik F, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan valid dan signifikan secara keseluruhan, sehingga layak dilanjutkan ke pengujian parsial (uji t) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individual.

### 4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistitik t)

Tabel 7 menyajikan hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel *Coefficients*, nilai konstanta sebesar

43,219 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap bernilai nol, maka tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada angka 43,219. Nilai ini menjadi titik dasar (baseline) yang menggambarkan posisi kemandirian fiskal daerah tanpa kontribusi fiskal dari variabel-variabel penelitian.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki koefisien regresi 2,216 dengan nilai t-hitung 12,574 dan signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, setiap peningkatan PAD secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Hal ini menegaskan bahwa PAD merupakan instrumen utama dalam mendorong kemandirian fiskal, karena pendapatan yang bersumber dari potensi lokal memberi daerah ruang gerak fiskal yang lebih besar tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Sementara itu, variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki koefisien regresi -1,199, nilai t-hitung -2,487, dan signifikansi 0,016. Hasil ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin besar DAU yang diterima, semakin rendah tingkat kemandirian fiskal. Pola ini sejalan dengan teori transfer fiskal yang menyatakan bahwa ketergantungan pada dana pusat berpotensi mengurangi motivasi dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri.

Kemudian, hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -1,890 dengan nilai signifikansi 0,023. Temuan ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah. Pengaruh negatif ini dapat dijelaskan oleh karakteristik DAK yang bersifat *specific grant* dan *earmarked*, di mana penggunaannya telah ditentukan secara ketat oleh pemerintah pusat untuk program-program prioritas nasional. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan fiskal (diskresi) untuk mengelola dana tersebut guna menstimulasi pendapatan aslinya secara fleksibel. Akibatnya, tingginya alokasi DAK justru mencerminkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam membiayai pembangunan, yang secara rasio justru menekan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya, variabel Dana Bagi Hasil (X4) menampilkan koefisien regresi 1,768 dengan nilai t-hitung 1,197 dan signifikansi 0,236. Karena nilai signifikansi jauh di atas ambang  $\alpha = 0,05$ , DBH dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa DBH yang diterima daerah belum cukup proporsional atau belum digunakan secara optimal untuk memperkuat pendapatan daerah sehingga tidak mampu meningkatkan kemandirian fiskal secara langsung.

Berbeda dengan variabel sebelumnya, Dana Hibah (X5) memiliki koefisien regresi 5,113, nilai t-hitung 2,092, dan signifikansi 0,041. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Hibah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, peningkatan Dana Hibah mampu mendukung aktivitas atau program daerah yang secara tidak langsung memperkuat kapasitas fiskal dan memungkinkan daerah memiliki ruang fiskal lebih besar. Dalam konteks tertentu, Dana Hibah dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif yang memperbaiki kualitas layanan publik, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan basis PAD.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan DH memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara DAK dan DBH tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan demikian, kemandirian fiskal daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan mandiri serta efektivitas pemanfaatan dana hibah, bukan oleh besaran transfer terikat atau bagi hasil dari pusat.

**Tabel 5. Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	43.219	5.428		7.962	0,000
Pendapatan Asli Daerah	2.216	0.176	0.958	12.574	0.000
Dana Alokasi Umum	-1.199	0.450	-0.203	-2.487	0.016
Dana Alokasi Khusus	-1.890	0.806	-0.162	-2.344	0.023
Dana Bagi Hasil	1.768	1.477	0.068	1.197	0.236
Dana Hibah	5.113	2.444	0.96	2.092	0.041

Sumber: Data yang Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 5 *Coefficients*, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandirian Keuangan} = 43.219 + 2.216(X1) - 1.199(X2) - 1.890(X3) + 1.768(X4) + 5.113(X5) + \varepsilon$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 43.219 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 43.219.

2. Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 2.216 dengan tingkat signifikansi 0.000, sehingga PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Dana Alokasi Umum (X2) memiliki koefisien regresi  $-1.199$  dengan nilai signifikansi 0.016, sehingga DAU secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah pengaruh negatif.
4. Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki koefisien regresi  $-1.890$  dengan tingkat signifikansi 0.023, sehingga DAK berpengaruh signifikan dan memiliki arah pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil (X4) memiliki koefisien regresi 1.768 dan tingkat signifikansi 0.236, sehingga DBH dinyatakan tidak berpengaruh signifikan.
6. 0.236, sehingga DBH dinyatakan tidak berpengaruh signifikan.
7. Dana Hibah (X5) memiliki koefisien regresi 5.113 dengan tingkat signifikansi 0.041, sehingga Dana Hibah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
8. Berdasarkan seluruh hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan Dana Hibah berpengaruh signifikan, sedangkan DBH tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### 5. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, ringkasan keputusan pengujian hipotesis disajikan dalam Tabel 8 berikut ini.

**Tabel 6. Pernyataan Hipotesis**

<b>Pernyataan Hipotesis</b>	<b><i>p-value</i></b>	<b>Keputusan</b>
J1: PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah	0.000	Diterima
J2: DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	0.016	Diterima
J3: DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	0.023	Diterima
J4: DBH berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	0.236	Ditolak
J5: Dana Hibah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	0.041	Ditolak*

\*Keterangan: Hipotesis 5 ditolak karena meskipun signifikan, arah koefisiennya positif (4.904), bertentangan dengan hipotesis awal yang menduga pengaruh negatif.

Sumber: Data yang Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8 di atas, interpretasi hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (J1): Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 2,216. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, J1 diterima.
2. Hipotesis Kedua (J2): Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi 0,016 ( $< 0,05$ ) dengan koefisien regresi bertanda negatif sebesar  $-1,199$ . Hasil ini mengonfirmasi bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, J2 diterima.
3. Hipotesis Ketiga (J3): Hasil analisis statistik menunjukkan nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,023, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, J3 diterima.
4. Hipotesis Keempat (J4): Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,236 ( $> 0,05$ ). Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi DBH tidak memberikan

dampak statistik yang nyata terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, J4 ditolak.

5. Hipotesis Kelima (J5): Variabel Dana Hibah memiliki nilai signifikansi 0,041 ( $< 0,05$ ), yang berarti berpengaruh secara statistik. Namun, koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 5,113, yang berlawanan dengan arah hipotesis awal yang menduga pengaruh negatif. Karena arah pengaruh tidak sesuai dengan prediksi, maka J5 ditolak.

### 1. Dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Pilar Utama Penguatan Kemandirian Fiskal

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini secara fundamental mengonfirmasi Teori Kemandirian Keuangan Daerah, yang mendefinisikan kemandirian sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menggunakan sumber daya yang digali dari potensi lokalnya sendiri. Halim (2007) menegaskan bahwa rasio PAD terhadap total pendapatan merupakan indikator utama kesehatan fiskal; semakin tinggi kontribusi PAD, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, yang menandakan tingginya derajat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Dalam perspektif Teori Desentralisasi Fiskal, PAD merupakan manifestasi nyata dari *fiscal discretion* (keleluasaan fiskal) yang menjadi tujuan utama otonomi daerah. Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif, melainkan penyerahan tanggung jawab fiskal agar daerah dapat merespons kebutuhan lokal secara efisien. Sejalan dengan temuan Bella et al. (2022) serta Maharani dan Haryanto (2025), peningkatan PAD memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai preferensi

masyarakat tanpa terikat oleh petunjuk teknis yang kaku dari pemerintah pusat.

Secara empiris di Provinsi Jawa Barat periode 2022-2024, fenomena ini terlihat jelas pada daerah dengan basis ekonomi industri yang kuat, seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung. Tingginya realisasi pajak dan retribusi di daerah-daerah tersebut berbanding lurus dengan tingginya skor kemandirian keuangan mereka. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mentransformasi kewenangan desentralisasi menjadi produktivitas ekonomi yang nyata, sehingga PAD mampu menjadi pilar penyangga utama struktur APBD menggantikan dominasi dana transfer.

### 2. Fenomena *Flypaper Effect* dan Dampak Negatif Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Otonomi Daerah

Penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini dapat dijelaskan melalui paradoks dalam Teori Desentralisasi Fiskal yang dikenal sebagai *Flypaper Effect*. Oates (1999) dalam Andriana (2020) menjelaskan bahwa meskipun DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan (*fiscal equalization*), tingginya alokasi dana yang bersifat umum (*block grant*) ini justru memicu efek disinsentif. Ketersediaan dana transfer yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, seperti belanja pegawai, cenderung membuat pemerintah daerah merespons belanja secara lebih boros dan melemahkan motivasi untuk mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan aslinya sendiri.

Ditinjau dari Teori Kemandirian Keuangan Daerah, pengaruh negatif ini mengindikasikan adanya pola hubungan yang instruktif dan ketergantungan yang akut. Hapsari et al. (2025) menekankan bahwa rasio kemandirian yang rendah mencerminkan ketidakmampuan daerah membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Hasil studi ini memperkuat argumen Musfirati dan Sugiyanto (2019) bahwa dominasi DAU menciptakan ilusi fiskal, di mana daerah merasa memiliki kapasitas belanja yang besar, padahal kapasitas

riilnya sangat rendah. Semakin besar porsi DAU yang diterima, semakin kecil porsi kemandirian yang terbentuk, karena struktur keuangan daerah didominasi oleh dana eksternal.

Kondisi empiris di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa DAU masih diperlakukan sebagai instrumen "penyambung nyawa" anggaran, bukan sekadar stimulus pemerataan. Ketergantungan struktural ini menyebabkan stabilitas layanan publik di daerah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan transfer pemerintah pusat. Dengan demikian, selama DAU masih menjadi penopang utama untuk membiayai belanja rutin operasional, cita-cita untuk mewujudkan daerah yang mandiri secara substansial akan sulit tercapai.

### 3. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Bersifat Restriktif dalam Menekan Rasio Kemandirian

Hasil pengujian statistik terbaru menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam kerangka Teori Desentralisasi Fiskal, temuan ini menyoroti karakteristik DAK sebagai *specific grant* (bantuan spesifik) yang sarat dengan pengendalian pusat. Sifat DAK yang *earmarked* (penggunaannya telah ditentukan) melalui petunjuk teknis yang ketat menyebabkan pemerintah daerah kehilangan fleksibilitas manajerialnya. Maharani dan Haryanto (2025) menjelaskan bahwa meskipun DAK menambah total penerimaan, dana ini pada hakikatnya hanya "numpang lewat" untuk membiayai prioritas nasional di daerah, sehingga tidak mencerminkan diskresi fiskal daerah yang sesungguhnya.

Berdasarkan Teori Kemandirian Keuangan Daerah, korelasi negatif ini menegaskan bahwa besarnya dana yang dikelola daerah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kemandiriannya jika dana tersebut tidak dapat dikendalikan penggunaannya (*uncontrollable*). Tingginya alokasi DAK justru menjadi indikator bahwa daerah tersebut masih sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program

prioritasnya. Kondisi ini menurunkan rasio kemandirian karena proporsi pendapatan yang diatur oleh pusat menjadi jauh lebih dominan dibandingkan pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh daerah.

Di Jawa Barat, realisasi DAK yang besar umumnya terserap untuk proyek fisik yang dampaknya terhadap peningkatan PAD membutuhkan waktu lama (*time-lag*). Karena dana ini terikat aturan pusat, daerah tidak dapat mengalihkannya untuk menstimulasi sektor-sektor ekonomi lokal yang lebih potensial menghasilkan pendapatan jangka pendek. Akibatnya, peningkatan DAK secara statistik justru menekan angka rasio kemandirian keuangan, membuktikan bahwa pembangunan daerah di Jawa Barat masih sangat didorong oleh intervensi fiskal dari pemerintah pusat (*central-driven*) daripada kemampuan mandiri daerah.

### 4. Volatilitas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Ketidakmampuannya dalam Memengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil analisis statistik menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Merujuk pada Teori Desentralisasi Fiskal, DBH didesain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal dengan membagi keuntungan sumber daya alam dan pajak kepada daerah penghasil. Namun, Andriana (2020) mencatat bahwa karakteristik DBH sangat fluktuatif (*volatile*) karena bergantung pada faktor eksternal di luar kendali daerah, seperti harga komoditas global atau kebijakan tarif pajak nasional. Ketidakpastian ini menyebabkan DBH sulit dijadikan sandaran dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Teori Kemandirian Keuangan Daerah, ketidaksignifikanan ini terjadi karena daerah tidak memiliki kendali (*control*) atas besaran DBH yang diterima. Musfirati dan Sugiyanto (2019) menyatakan bahwa kemandirian mensyaratkan adanya upaya aktif daerah (*tax effort*), sedangkan DBH bersifat *given* (pemberian). Kenaikan atau penurunan DBH tidak mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi

keuangannya, sehingga dana ini seringkali diperlakukan sebagai pendapatan *windfall* (tak terduga) yang habis digunakan untuk belanja rutin tanpa dampak struktural terhadap kapasitas fiskal.

Kondisi di Jawa Barat memperlihatkan adanya kesenjangan penerimaan DBH yang cukup lebar antara daerah penghasil migas dan non-penghasil, namun secara agregat kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen dana transfer lainnya. Karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, DBH tidak mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan atau menurunkan derajat kemandirian keuangan daerah secara konsisten. Hal ini menjelaskan mengapa secara statistik, variasi DBH tidak berdampak nyata terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat.

### 5. Optimalisasi Dana Hibah sebagai Stimulan Produktif bagi Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah Dana Hibah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, berbeda dengan asumsi awal. Dari sudut pandang Teori Desentralisasi Fiskal, hibah saat ini seringkali didesain sebagai instrumen insentif berbasis kinerja (*performance-based grant*) atau memerlukan dana pendamping (*matching fund*). Gemiharto dan Rosfiantika (2017) menyoroti bahwa di tengah risiko penyalahgunaan, mekanisme penyaluran hibah di Jawa Barat yang semakin ketat menuntut pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan keuangannya agar layak mengakses dana tersebut. Proses ini secara tidak langsung menstimulasi peningkatan kapasitas manajemen fiskal daerah.

Dalam konteks Teori Kemandirian Keuangan Daerah, meskipun hibah bersumber dari eksternal, penggunaannya yang produktif dapat menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi lokal. Dana hibah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis atau perbaikan layanan publik dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang distimulasi oleh dana hibah ini

pada akhirnya akan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama pembentuk kemandirian keuangan di masa depan.

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mampu memanfaatkan dana hibah secara efektif untuk mendukung program-program daerah yang tidak tercover oleh APBD reguler. Positifnya pengaruh ini membantah anggapan bahwa semua bantuan eksternal menciptakan ketergantungan; sebaliknya, jika dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang baik, dana hibah justru memberikan daya ungkit (*leverage*) bagi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat yang bersifat mengikat.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar kemandirian keuangan yang dimiliki daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana transfer umum yang diterima, maka tingkat kemandirian fiskal cenderung menurun. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Adapun Dana Hibah terbukti signifikan, namun arah pengaruhnya tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah lebih ditentukan oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD serta pengelolaan dana hibah, bukan oleh besarnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi. Secara kebijakan, bagi Pemerintah Daerah di Jawa Barat, temuan signifikansi positif PAD (J1) dan negatif DAU (J2) mengimplikasikan urgensi untuk

mengintensifkan program ekstensifikasi dan digitalisasi pajak daerah, sekaligus merumuskan kebijakan belanja yang lebih efisien agar tidak terlalu bergantung pada DAU. Bagi Pemerintah Pusat, temuan tidak signifikannya DAK (J3) dan DBH (J4) dapat menjadi bahan evaluasi untuk meninjau kembali efektivitas formula alokasi dan pengawasan *output* dana transfer tersebut agar lebih berdampak pada kemandirian. Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengatasi keterbatasan studi ini dengan (1) menambahkan variabel kontrol penting seperti Belanja Modal dan PDRB, (2) memperpanjang periode observasi, dan (3) melakukan studi komparatif dengan provinsi lain untuk menguji validitas eksternal temuan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *JURNAL AKUNTANSI*, 13(1), 30–39.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2024*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5), 675–783.
- B, S., & Y, F. (2021). Dana Alokasi Umum Dan Kemandirian Daerah: Analisis Empiris. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 10(3), 90–105.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 1(2), 38-47
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call For Paper*, 1(1), 61–69.
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 7.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). *Basic Econometrics*, McGraw-Hill. New York.
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1), 39–53.
- Halim, A. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah* (3rd Ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujatmiko, D. P., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164.

- <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Hartoto, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori Dan Praktik)* (Hartono (Ed.); 1st Editio). Penerbit Widina Media Utama.
- Karina, A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Maharani, Z. P., & Haryanto, H. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 14(3).
- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337.
- Marbun, R. M. W. S. T., Riani, I. A. P., & Bisai, C. M. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 3(1), 564710.
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Sulistyowati, A., & Prasetyo, A. W. (2025). Akuntabilitas Dana Desa: Kajian Terhadap Peran Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Kompetensi Aparatur Desa. *JURNAL AKUNIDA*, 11(1), 16-28.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Implementing Decentralization Policies: An Introduction. *Decentralization And Development: Policy Implementation In Developing Countries*, 9–34.
- Sarumaha, M., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111.
- Sulistyowati, A., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Riskanita, D., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan, Sistem Pencatatan Keuangan Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa: The Influence Of Financial Manager Competence, Financial Recording System, And Village Community Participation On The Financial Performance Of Village-Owned Enterprises. *Al Dzahab*, 6(2), 239-249.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1).
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(1), 277–286.

- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).
- Torry, K., Dwijayanti, P., & Diatmika, I. P. G. (2025). Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal , Kemandirian Keuangan , Serta Ketergantungan Keuangan Daerah Di Desa Busungbiu , Kecamatan Busungbiu. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi (VJRA)*, 14(3), 217–227.
- Purpitasari, P., & Kurnia, K. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(11).
- Rahayu, Y. S., & Hendaris, R. B. (2025). Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah Dan Upaya Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023). *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 9(2), 1114-1125.
- Rahmawati, R. N., Pratiwi, H. E., Lisniwati, M., Afriani, L. D., & Haryadi, A. K. (2024). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, DAK, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 115–126.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *INOVASI*, 13(2), 78–89.  
[Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Ind ex.Php/INOVASI](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Ind ex.Php/INOVASI)
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK*, 7(1), 11–21.